

HALAMAN JUDUL

DAMPAK KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN BULUNGAN

Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 pada jurusan

Ilmu Pemerintahan

Oleh:

ACHMAD THANTEO
20120520070

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ISI POL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PENEGSAHAN

SKRIPSI

Dengan judul :

**DAMPAK KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN BULUNGAN**

Disusun Oleh :

**ACHMAD THANTEO
20120520070**

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada :

Hari/Tanggal :

Tempat :

Jam :

SUSUNAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN

Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini disusun tanpa mengambil bahan hasil penelitian baik untuk suatu gelar atau diploma yang sudah ada di suatu universitas maupun hasil penelitian lain. Sejauh yang penulis ketahui, skripsi ini juga tidak mengambil bahan dari publikasi atau tulisan orang lain kecuali yang sudah disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Desember 2017

Achmad Thanteo

MOTTO

- Meminta lah selagi bisa, minta lah doa kedua orang tua.
- Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok. (Al hadits)

PERSEMBAHAN

- Kupersembahkan kepada Abah (Bapak Taufik) dan Mama (Hj. Masriah), yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
- Saudara saya Arnanda dan Raya Fah Reza (Kakak dan Adik), yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, dukungan kalian memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih.
- Sahabat dan Teman, terimakasih untuk canda tawa, segelas kopi dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk waktu nya.

Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini penulis lakukan berfokus pada DAMPAK TERBENTUKNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN BULUNGAN.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat di kemudian hari bagi pihak yang diteliti agar terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Walaupun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Namun dengan segala daya dan upaya serta pemikiran penulis akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan doa serta dukungan dari keluarga dan semua pihak yang membantu proses penyusunan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu proses penyusunan skripsi ini baik dukungan moril ataupun materilnya.

1. Mama dan Abah yang selalu berusaha membantu saat saya mengalami kesusahan ataupun masalah, tidak pernah menyerah menghadapi satu anak yang seperti saya.
2. Dosen pembimbing yang tiada henti terus mendorong dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan atas semua waktu dan saran yang di berikannya kepada penulis.
3. Dosen penguji sekaligus dosen pembimbing, terima kasih atas nasihat, saran, serta masukan, sumbangan pemikiran dan waktu yang telah diberikannya kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Ketua jurusan ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Dosen-dosen serta semua karyawan jurusan ilmu pemerintahan khususnya dan semua karyawan yang bertugas di UMY, yang telah banyak membantu selama penulis menempuh perkuliahan di umy.
7. Bapak Marso, SE. selaku Kepala bidang penerimaan dan Pengeluaran Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan yang

telah meluangkan waktu dan tempatnya pada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

8. Bapak Ferdy Manurun Tanduklangi, SE, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara yang telah memberikan waktu kepada penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan.
9. Bapak Hairullah, SE. M.Si selaku Kepala bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bulungan yang juga membantu penulis dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Yogyakarta, 16 Desember 2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMPAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
SINOPSIS	xiv
BAB.I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Manfaat Penelitian	8
1.4. Studi Terdahulu	9
1.5. Kerangka Dasar Teori	12
1.5.1. Pemerintah Daerah.....	12
1.5.2. Otonomi Daerah.....	13
1.5.3. Pemekaran.....	15
1.5.4. Aparat Pemerintah.....	20
1.5.5. Perekonomian Masyarakat.....	22
1.5.6. Indikator dampak pemekaran terhadap ekonomi daerah.....	24
1.6. Definisi Konsepsional.....	29
1.7. Definisi Operasional	29
1.8. Ruang Lingkup	30
1.9. Metode Penelitian	30
1.9.1. Jenis Penelitian	30
1.9.2. Jenis Data	31

1.9.3. Unit Analisi Data	32
1.9.4. Teknik Pengumpulan Data	32
1.9.5. Teknik Analisis Data	33
BAB.II. DESKRIPSI KABUPATEN BULUNGAN	35
2.1. Kabupaten Bulungan.....	35
2.2. Visi Kabupaten Bulungan	35
2.3. Letak Geografis	38
2.4. Pemerintahan	41
2.5. Pendudukan dan Angkatan Kerja	43
2.5.1. Kependudukan	43
2.5.2. Angkatan Kerja	44
2.5.3. Mata Pencaharian	45
2.6. Pendapatan Regional	46
2.6.1. Struktur Ekonomi	46
2.6.2. Pertumbuhan Ekonomi	46
2.6.3. PDRB Per Kapita	47
BAB.III. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
3.1. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.....	48
3.1.1. Pengelolaan perekonomian pemerintah daerah.....	49
3.1.2. Tugas dan wewenang aparatur pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah.....	50
3.1.3. Perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat ..	52
3.1.4. Cara Pemerintah menangani permasalahan-permasalahan perekonomian	54
3.1.5. Wujud pelayanan pemerintah dalam kaitannya dengan perekonomian masyarakat	56
3.2. Pengelolaan Potensi Daerah.....	58
3.2.1. Potensi SDA di Kabupaten Bulungan	58
3.2.2. Lokasi potensi daerah di Kabupaten Bulungan.....	59
3.2.3. Pengelolaan potensi daerah di Kabupaten Bulungan	61
3.2.4. Alasan pemanfaatan potensi daerah	65

3.2.5. Pihak yang berwenang dalam pengelolaan potensi daerah	66
3.3. Kondisi Perekonomian Masyarakat	67
3.3.1. Kondisi Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Bulungan ..	67
3.3.2. Faktor yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat	68
3.3.3. Pengaruh pemekaran wilayah provinsi Kalimantan Utara.....	71
3.3.4. Dampak positif pemekaran daerah Kalimantan Utara	72
3.3.5. Dampak negatif pemekaran daerah Kalimantan Utara	76
BAB.IV. PENUTUP	78
3.1. Kesimpulan	78
3.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.Banyaknya Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2014	43
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Fokus berbagai profesi dalam arena pembangunan kesejahteraan...	25
Gambar 1.2. Kerangka koseptual evaluasi pemekaran daerah.....	26
Gambar 1.3. Kerangka Berpikir Penelitian	28
Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Bulungan.....	40
Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulungan	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Perkembangan Penduduk Kabupaten Bulungan 2012-2014 (Jiwa) ...	44
Grafik 2.2. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2014.....	45

SINOPSIS

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan peluang pembentukan daerah yaitu pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersanding atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Undang-Undang tersebut dibuat untuk menetapkan kebijakan-kebijakan terkait daerah pemekaran dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengambil judul Dampak Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara terhadap Perekonomian Masyarakat Kabupaten Bulungan. Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan daerah pemekaran dari segi perekonomian yaitu kinerja aparatur daerah, potensi daerah, dampak pemekaran daerah Kalimantan Utara terhadap perekonomian kabupaten bulungan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah; wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Unit analisis pada penelitian ini adalah pemerintah kabupaten Bulungan dan pihak-pihak yang terkait

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemekaran daerah Kalimantan utara berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan di Kabupaten Bulungan, khususnya aspek perekonomi masyarakat. Keterlibatan Pemerintah daerah dalam hal sumber daya daerah berkaitan dengan perekonomian di Kabupaten Bulungan yaitu sebagai pihak yang mengelola keuangan dan sumber daya daerah dengan beberapa elemen yang berpengaruh seperti aparat daerah, pihak swasta, dan masyarakat. Pembangunan perekonomian masyarakat Kabupaten Bulungan erat kaitannya dengan potensi daerahnya dan pemanfaatannya yang dikelola dengan prinsip ramah lingkungan. Penghasilan yang diperoleh daerah berupa royalty dan pajak. Secara ekonomi dampak positif dari pemekaran wilayah yaitu pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat, meningkatkan iklim investasi di Kalimantan Utara. Peningkatan Investasi bisa menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Bulungan, dan pembangunan wilayah terpencil atau perbatasan bisa lebih diperhatikan. Sedangkan dampak negatif pemekaran terhadap perekonomian belum ada, namun tetap memerlukan evaluasi pada kebijakan-kebijakan yang telah dibuat agar sesuai dengan harapan pembentukan daerah otonom baru.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka, hal yang harus ditingkatkan oleh pihak pemerintah yaitu pelayanan kepada masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi, dengan merespon setiap permasalahan masyarakat dapat meminimalisir dampak secara ekonomi yang dapat merugikan berbagai pihak. Adanya evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan perekonomian di setiap wilayah di Kabupaten Bulungan, khususnya pertambangan sehingga dapat meminimalisir atau mengantisipasi kerusakan lingkungan akibat adanya kegiatan eksploitasi yang dilakukan secara ilegal.